

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Volatilitas harga beras di Kabupaten Kebumen selama periode 2017 hingga 2024 menunjukkan tingkat fluktuasi yang tinggi, dengan nilai volatilitas lebih dari 1, yang mengindikasikan ketidakstabilan harga yang signifikan. Kenaikan harga terbesar tercatat pada Januari 2018 dengan persentase sebesar 15,5%, sementara penurunan harga terbesar terjadi pada April 2024 dengan angka -12,08%. Fluktuasi harga ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya inflasi nasional, keterlambatan masa tanam, distribusi beras melalui program bantuan sosial menjelang pemilu, gangguan distribusi, fenomena La Nina, serta kenaikan harga pupuk dan bahan bakar.
2. Berdasarkan hasil analisis IPA terhadap 14 indikator dari lima instansi yang berperan dalam stabilisasi harga beras di Kabupaten Kebumen diperoleh pemetaan indikator ke dalam empat kuadran Indikator pada Kuadran I (*Concentrate Here*) adalah pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas padi. Kuadran I berada di atas rata-rata dari segi kepentingan, namun segi kinerja di bawah rata-rata. Indikator pada Kuadran II (*Keep Up the Good Work*) adalah stabilitas harga di tingkat gapoktan, diversifikasi ketahanan pangan, jaringan irigasi yang baik, dan kualitas jalan kabupaten. Kuadran II berada di atas rata-rata baik dari segi kepentingan maupun kinerja. Indikator pada Kuadran III (*Low Priority*) adalah hari pemantauan harga. Kuadran III berada di bawah rata-rata baik dari segi kepentingan maupun kinerja. Indikator pada Kuadran IV (*Possible Overkill*) adalah penanganan kerawanan pangan, pengelolaan sumber daya ekonomi, serta pengadaan dan penyaluran beras. Kuadran IV berada di bawah rata-rata dari segi kepentingan namun segi kinerja berada di atas rata-rata.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Volatilitas harga beras di Kabupaten Kebumen dapat dikurangi dengan beberapa langkah teknis dan aplikatif yang diterapkan secara terkoordinasi. Koordinasi antara Distapang, DPUPR, dan Bappeda dalam rapat Komisi Irigasi harus dimaksimalkan

untuk memanfaatkan data cuaca dan kondisi hidrologi yang diperoleh dari BMKG. Pemantauan cuaca dan kondisi hidrologi lokal yang dilakukan dua kali setahun harus digunakan secara optimal untuk membuat keputusan yang lebih dinamis, seperti penyesuaian jadwal tanam berdasarkan prediksi cuaca terkini, serta pengaturan distribusi air yang fleksibel. Pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi juga harus diprioritaskan di wilayah yang rawan kekeringan atau banjir guna memastikan pengelolaan air yang lebih efisien. Pengambilan keputusan yang cepat dan pengelolaan irigasi yang lebih adaptif, dapat meminimalisir keterlambatan masa tanam dan fluktuasi harga beras dapat lebih dikendalikan.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang disebabkan oleh distribusi beras bantuan sosial menjelang pemilu, pengelolaannya harus difokuskan pada mitigasi dampak pasar. Koordinasi antar instansi untuk menjaga stok cadangan beras, memantau harga pasar secara rutin, serta menyusun skenario intervensi cepat saat terjadi lonjakan harga, sangat penting guna mencegah ketidakpastian yang dapat mengganggu kestabilan harga. Terkait dampak kenaikan harga bahan bakar, dinas terkait perlu meningkatkan efisiensi distribusi beras dengan mengoptimalkan rute pengiriman dan memastikan cadangan beras tersedia di titik strategis, seperti pasar tradisional dan gudang daerah. Koordinasi dengan Bulog juga sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga yang wajar, sekaligus menghindari penumpukan beras di daerah surplus yang dapat memengaruhi harga pasar.

Sebagai langkah penunjang, untuk menekan dampak kenaikan harga pupuk, Disperindagkop UKM harus memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan. Selain itu, Distapang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien, baik dalam hal dosis yang tepat maupun teknik aplikasi yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Pemanfaatan pupuk organik sebagai alternatif yang lebih terjangkau perlu diperkenalkan lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya fluktuatif. Perbaikan infrastruktur distribusi, khususnya jaringan jalan dan irigasi, juga harus terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus pasokan dari sentra produksi ke konsumen, serta meminimalkan gangguan distribusi yang dapat memicu ketidakstabilan harga.

2. Upaya stabilisasi harga beras di Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan. Masukan untuk lembaga terkait antara lain Disperindagkop UKM perlu mengoptimalkan pengendalian harga kebutuhan pokok dengan memperkuat sistem pemantauan harga secara real-time yang lebih akurat dan terintegrasi, serta

meningkatkan penyelenggaraan pasar murah secara terjadwal di daerah-daerah yang rawan lonjakan harga. Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis data tren harga dan stok juga penting untuk mendeteksi dan mengantisipasi gejolak harga sejak dini. Distapang perlu mengoptimalkan program pelatihan untuk petani, termasuk penggunaan alat tanam mekanis dan benih unggul, serta meningkatkan kerja sama dengan DPUPR untuk memastikan saluran irigasi terjaga dengan baik.

Belum adanya kebijakan khusus yang secara eksplisit mengatur pengembangan sektor padi di Kabupaten Kebumen menunjukkan perlunya payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar koordinasi kelembagaan dan alokasi anggaran yang lebih terarah. Bappeda memiliki peran strategis dalam menginisiasi penyusunan strategi terpadu lintas perangkat daerah dengan melibatkan Distapang, Disperindagkop UKM, DPUPR, dan Bulog. Koordinasi ini perlu menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD 2026, yang secara spesifik memuat program-program prioritas untuk peningkatan produksi beras, efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan daerah, dan penyelenggaraan pasar murah secara berkelanjutan. Keberadaan Perda akan memperkuat posisi hukum koordinasi antar OPD dan memastikan adanya alokasi anggaran rutin yang mendukung stabilisasi harga dan ketahanan pangan daerah secara berkesinambungan.

DPUPR, sebagai penyedia infrastruktur, perlu memperbaiki jaringan irigasi dan akses jalan kabupaten. Bulog juga perlu mengevaluasi pelaksanaan program pengadaan dan penyaluran beras agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan frekuensi dan cakupan operasi pasar beras, terutama pada periode rawan seperti menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan, guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Bulog juga perlu memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam jumlah yang cukup di gudang wilayah Kebumen, agar penyalurannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran saat harga mulai bergejolak.

3. Penelitian ini memiliki implikasi akademik dalam memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas harga beras serta peran kelembagaan dalam pengendaliannya, khususnya di Kabupaten Kebumen. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang pertanian dan ketahanan pangan daerah. Secara praktis, hasil

penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan produksi padi, pengendalian fluktuasi harga beras, serta penguan sistem kelembagaan pertanian yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendukung pemberdayaan petani serta mendorong kemitraan dan kolaborasi antar-stakeholder dalam pembangunan sektor pertanian di Kebumen.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam ketersediaan data dan indikator untuk menganalisis peran kelembagaan dalam stabilisasi harga beras. Laporan kinerja Bappeda tidak rutin dan kurang lengkap, sehingga sulit menyusun indikator yang representatif. Data Bulog di tingkat kabupaten juga sulit diperoleh karena mayoritas data berskala nasional dan akses terbatas. Kendala ini menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya komprehensif sesuai harapan. Penelitian selanjutnya sebaiknya mendalami sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait stabilisasi harga beras, serta mengkaji penerapan teknologi digital untuk pemantauan harga dan distribusi. Selain itu, penting juga meneliti peran petani, pedagang, dan konsumen dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dengan pendekatan multidisipliner.

